

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait analisis terhadap keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, maka dapat ditarik Kesimpulan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 13 (tiga belas) *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali diantaranya Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa Samiran, Kepala Dusu Ngaglik, Pokdarwis "Guyub Rukun", UMKM "Samiran Asri" dan "Dapur Aura", Kelompok *Homestay*, Kelompok Seni, Kelompok Tani, Pemuda Desa Samiran, Universitas Diponegoro, dan PT.SMF. Pengelolaan Desa Wisata Samiran melibatkan beragam *stakeholder* yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer, dan *stakeholder* sekunder. Pokdarwis "Guyub Rukun" merupakan aktor sentral dengan peran dominan dalam manajemen operasional desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan wisata. Di samping itu, pelaku *homestay*, UMKM, kelompok seni, kelompok tani, serta pemuda desa turut memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan atraksi, penyediaan layanan, serta promosi. Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali memiliki peran strategis sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator program. Adapun pihak eksternal seperti Universitas Diponegoro dan PT SMF berperan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan sarana fisik, meskipun keterlibatan mereka masih bersifat insidental dan berbasis proyek. *Stakeholder* yang berperan sebagai *key player* dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi adalah Pokdarwis "Guyub Rukun",

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa dan Pemuda Desa Samiran. *Stakeholder* yang berperan sebagai *subject* dengan kepentingan tinggi dan pengaruh rendah adalah Pelaku *Homestay*, UMKM “Samiran Asri” dan “Dapur Aura”. *Stakeholder* yang berperan sebagai *context setter* dengan pengaruh tinggi dan kepentingan rendah adalah Universitas Diponegoro. *Stakeholder* yang termasuk dalam *crowd* dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah adalah Kepala Dusun Ngaglik, PT.SMF, Kelompok Seni dan Kelompok Tani. Hubungan antar *stakeholder* dalam pengelolaan Desa Wisata Samiran menunjukkan pola interaksi yang didominasi oleh bentuk koordinasi, mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya sinkronisasi program dan peran. *Stakeholder* utama seperti Pokdarwis, Dinas Pariwisata Provinsi, dan Kabupaten terlibat aktif dalam koordinasi lintas sektor. Hubungan komunikasi banyak ditemukan pada *stakeholder* dengan pengaruh terbatas seperti UMKM, kelompok tani, dan PT SMF, yang menunjukkan masih terbentuknya tahap awal hubungan. Sementara itu, hubungan kerjasama terjadi terutama antara Pokdarwis, Pemerintah Desa, pelaku *homestay*, dan pemuda, sebagai bentuk aliansi strategis berbasis kepentingan langsung terhadap pengembangan wisata. Tidak teridentifikasi adanya hubungan konflik, yang dapat diartikan sebagai hasil dari manajemen kolaboratif yang baik atau potensi konflik yang belum terungkap secara eksplisit. Secara keseluruhan, intensitas dan bentuk hubungan yang beragam menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Samiran telah mengarah pada model kolaboratif yang kuat, meskipun perlu didorong peningkatan peran *stakeholder* yang saat ini masih pasif. Hubungan yang kuat antar *stakeholder* kunci menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat dan Permasalahan Baru dalam Pengelolaan Desa Wisata

Permasalahan utama yang ditemukan adalah kesenjangan antara peran normatif dan peran aktual dari sejumlah *stakeholder*. Pemerintah Desa belum menetapkan regulasi spesifik (Peraturan Desa) yang mengatur tata kelola desa wisata, yang menyebabkan kelembagaan pengelola seperti Pokdarwis tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat. Di sisi lain, keterlibatan kelompok seni, pemuda, dan kelompok tani belum terorganisasi dalam struktur kelembagaan tetap, sehingga berpotensi mengganggu kesinambungan program wisata. Masalah legalitas usaha dan terbatasnya akses terhadap pembiayaan juga menjadi hambatan signifikan bagi pelaku *homestay* dan UMKM. Pendekatan *top-down* dari dinas terkait masih dominan dan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pemberdayaan komunitas secara partisipatif.

3. Upaya Strategis untuk Meningkatkan Pengelolaan Desa Wisata Samiran  
Peningkatan pengelolaan Desa Wisata Samiran memerlukan pendekatan kolaboratif dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan pariwisata merupakan langkah mendesak untuk memberikan dasar hukum yang jelas. Penguatan kelembagaan seperti pembentukan koperasi *homestay*, forum UMKM, dan tim kerja pemuda desa perlu dilakukan guna memperluas partisipasi dan distribusi manfaat secara merata. Pendekatan pendampingan jangka panjang dari perguruan tinggi dan sinergi program antara tingkat desa, kabupaten, dan provinsi harus terus diperkuat. Digitalisasi promosi, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan atraksi secara profesional menjadi aspek penting dalam mendorong keberlanjutan dan daya saing Desa Wisata Samiran ke depan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran-saran yang dapat diajukan untuk mendukung pengelolaan Desa Wisata Samiran adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Samiran Diperlukan penyusunan regulasi lokal berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang desa wisata untuk memberikan

dasar hukum yang kuat bagi Pokdarwis dan pelaku usaha wisata lainnya. Pemerintah desa juga disarankan membentuk unit kerja khusus yang menangani sektor pariwisata dalam struktur kelembagaan desa untuk menjamin kesinambungan dan integrasi program.

2. Bagi Pokdarwis "Guyub Rukun" Pokdarwis perlu melakukan konsolidasi internal melalui pembagian tugas yang sistematis, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pelaksanaan evaluasi berkala. Selain itu, penting untuk membentuk forum koordinasi lintas kelompok seperti UMKM, kelompok tani, kelompok seni, dan pemuda agar program pengelolaan dapat dilakukan secara sinergis.
3. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah Disarankan untuk memperkuat pendekatan partisipatif dalam pembinaan desa wisata melalui program pendampingan kelembagaan dan dukungan teknis yang adaptif terhadap dinamika lokal. Intervensi program tidak hanya difokuskan pada sarana fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas manajerial dan keberdayaan masyarakat.
4. Bagi Institusi Mitra seperti Universitas dan Lembaga Swasta Universitas, khususnya Universitas Diponegoro, diharapkan membentuk kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Desa melalui perjanjian kerja sama (MoU) yang mencakup kegiatan riset terapan, pengabdian masyarakat, serta pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan. Lembaga swasta seperti PT SMF perlu mengembangkan program CSR yang berbasis monitoring dan pendampingan jangka panjang untuk menjamin keberhasilan program pembiayaan.
5. Bagi Masyarakat Desa Samiran Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam pengelolaan pariwisata desa. Kegiatan penguatan kapasitas seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan usaha, dan pengembangan atraksi wisata harus diikuti secara aktif oleh masyarakat guna meningkatkan daya saing dan manfaat ekonomi secara kolektif.